

Resistensi Pengelolaan Wisata Religi di Makam Dalem Santri Kotaliman Banyumas

Sulkhan Chakim^{1*}, Abdul Basit², Muhammad Ash-Shidiqy³, Akhmad Roja Badrus Zaman⁴

¹ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; sulkhan@uinsaizu.ac.id

² UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; abdulbasit@uinsaizu.ac.id

³ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; massidiqy@uinsaizu.ac.id

⁴ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; akhmadroja@uin-suka.ac.id

* Correspondence: sulkhan@iainpurwokerto.ac.id

Received: 2021-05-03; Accepted: 2021-08-29; Published: 2021-12-29

Abstract: Tourism is generally understood as a relationship between managers, local governments, local communities, business people, and tourists in the form of service interactions. In the context of religious tourism that is developing in Indonesia, especially tourism, it tends to increase sharply but in reality there are still many grave sites of the guardians that have not been managed with tourism standards. This study aims to explore how the resistance of religious tourism management to the tomb of Dalem Santri Kotaliman, in Banyumas district. The research approach used is qualitative with an interpretive paradigm. Data collection techniques used in-depth interviews, participatory observations, documentation that supports this research. The findings of this study are the tomb of Dalem Santri as a tourist attraction in an effort to community-based management raises resistance, in the form of 1) Rejection of minority groups for community-based management. 2) The interests of socio-religious investors in the development of facilities. 3) The process of institutionalization of management is hampered. Optimalization of education, empowerment and community advocacy is needed to reduce resistance in the management of the Dalem Santri Tomb.

Keywords: Dalem Santri tomb; Management; Religious tourism; Resistance.

Abstrak: Kepariwisata secara umum dipahami sebagai relasi antar pengelola, pemerintah daerah, masyarakat lokal, pebisnis, serta wisatawan dalam wujud interaksi pelayanan. Dalam konteks wisata religi yang berkembang di Indonesia, khususnya wisata/ziarah cenderung meningkat tajam namun pada kenyataannya masih banyak situs makam para wali belum terkelola dengan standar keparwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana resistensi pengelolaan wisata religi makam Dalem Santri Kotaliman, di kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma interpretatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dokumentasi yang mendukung penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah makam Dalem Santri sebagai objek wisata dalam upaya pengelolaan berbasis pada masyarakat memunculkan resistensi, berupa; 1) Penolakan kelompok minoritas atas pengelolaan berbasis pada masyarakat. 2) Kepentingan investor sosial keagamaan dalam pengembangan sarana. 3) Proses institusionalisasi pengelolaan terhambat. Optimalisasi edukasi, pemberdayaan dan advokasi masyarakat dibutuhkan untuk memperkecil resistensi dalam pengelolaan Makam Dalem Santri tersebut.

Kata Kunci: Makam Dalem Santri; Pengelolaan; wisata religi; Perlawanan.

1. Pendahuluan

Umat Islam yang cenderung dipandang sebagai kelompok mayoritas dan dominan, justru dalam hal pengelolaan potensi wisata religi (makam-makam para wali) kurang mendapat perhatian secara serius. Kepariwisata tentunya melibatkan interaksi berbagai pihak, yaitu masyarakat setempat, pemerintah desa dan pemerintah daerah, pelaku ekonomi, para pengunjung dan pihak-pihak yang

berkepentingan dalam wujud interaksi pelayanan. Secara umum, ragam potensi kepariwisataan dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (M. F. Anwar et al., 2017). Potensi tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat dan mengeksplorasi pembangunan kepariwisataan, baik dalam skala lokal, maupun regional, nasional, dan bahkan internasional (Hartiningih, 2019). Peluang tersebut dapat terealisasi, salah satunya adalah dengan adanya pembangunan dan pengembangan berkelanjutan yang terencana dan matang (Ariyanto, 2005).

Indonesia dikenal memiliki kepariwisataan berbasis aneka keagamaan yang mempesona dari aspek harmonisasinya di seluruh dunia. Muslim sebagai pemeluk agama terbesar di Indonesia memberikan sumbangsih dalam segmentasi pasar pariwisata baru. Kebiasaan dan keyakinan keagamaan untuk berziarah ke makam-makam auliya', dapat dijadikan model kepariwisataan berbasis spiritualitas tersendiri (Annisa, 2018). Wisata keagamaan atau wisata religi sering dihubungkan dengan acara adat istiadat, keyakinan, dan kepercayaan umat, atau komunitas-komunitas tertentu dalam masyarakat tertentu (R. K. Anwar et al., 2017). Praktik wisata religi ini merupakan praktik sosial yang tidak bisa lepas dari agen sosial (Bourdieu, 1998) yang berpengaruh di masyarakat dan kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini tergantung pada orientasi agen sosial atau tokoh yang memiliki reputasi dan berpengaruh tersebut yang mampu mengelola dan membawa jamaahnya ke makam para aulia, dan tokoh agama yang dianggap suci dan keramat dan bahkan sakti. Selain itu, banyak situs keagamaan yang dijadikan obyek wisata religi karena memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga mereka mau berkunjung ke tempat tersebut.

Pengelolaan wisata religi yang dimaksud dengan model *Community Based Tourism* (CBT) merupakan konsep pengembangan destinasi kepariwisataan melalui edukasi, pemberdayaan dan advokasi masyarakat lokal yang mana masyarakat terlibat dalam hal pengorganisasian, perencanaan motivasi, perekrutan personal dan penggerak, serta pengawasan (Salah, 1989). Beberapa penelitian kepariwisataan secara umum telah dilakukan oleh para peneliti, antara lain: penekanan pengelolaan wisata dengan cara pelibatan partisipasi masyarakat lokal (Kayat, 2010), penekanan pada segmentasi masyarakat (Kibicho, 2008), keberlanjutan pengelolaan wisata (Okazaki, 2008). Dalam kepariwisataan religi beberapa peneliti menyatakan, bahwa pengelolaan wisata religi mampu menaikkan pendapatan masyarakat sekitar (Rawis et al., 2015), penggalan potensi ekonomi dan berimplikasi pada persoalan soio-ekonomi (Fachri, 2018), Pengembangan wisata gereja dan peningkatan ekonomi lokal (Gunawan et al., 2016), pengembangan dan faktor penghambatnya (M. A. Anwar, 2019). Beberapa contoh jenis penelitian telah dilakukan, tetapi untuk membahas pengelolaan model CBT, jarang dikaji pada aspek interaksi sosial dan pendayagunaan sumber daya antara komunitas lokal dan wisatawan yang terjadi dalam destinasi wisata religi, menjadi sangat penting untuk memahami resistensi masyarakat lokal yang berasal dari internal maupun eksternal dalam kegiatan kepariwisataan.

Pendekatan ekonomi politik (Mosco, 1996) adalah kerangka kerja yang diterima dengan baik dan sesuai (Graham, 2007) untuk menganalisis konflik-konflik kepentingan dan implikasi ekonomi masyarakat lokal terhadap dampak dan pengelolaan pariwisata pada umumnya ataupun wisata religi. Dengan demikian, model ini membantu untuk mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat lokal, persepsi tentang dampak sosial dan budaya pariwisata (positif dan negatif), serta dukungan untuk pengembangan wisata religi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana resistensi yang disebabkan oleh pengelolaan dengan model CBT dalam makam Dalem Santri di Kutaliman, kabupaten Banyumas.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan paradigma interpretative subyektif dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini.

Data dianalisis, yakni kata-kata atau kalimat yang bersumber dari informan yang ada di sekitar makam Dalem Santri pemerintah desa, kelompok Sadar Wisata, masyarakat sekitar dan para peziarah dengan jumlah 30 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk memperoleh informasi individual, dan diperkuat dan diperluas untuk memperoleh informasi dari beberapa tokoh yang nampak berbeda kepentingan. Data-data yang bersumber dari lapangan tersebut akan diperkuat dengan data yang bersumber dari dokumen, baik dari bahan Pustaka terkait maupun dari peninggalan-peninggalan yang ada di para pengelola makam Dalem Santri. Dengan cara demikian akan didapatkan data yang bersifat holistic dan obyektif sesuai dengan metode penelitian kualitatif (Soehadha, 2012).

Untuk mempertajam analisis dan temuan yang ada digunakan pendekatan ekonomi politik (Mosco, 1996). Pendekatan ini mampu mendalami pengalaman langsung atau kesadaran dari para informan dan sekaligus mencari keunikan-keunikan yang ada di lokasi penelitian. Dalam penerapannya, pendekatan ini akan dijadikan sebagai panduan dalam mendisplay data dan teori dalam satu kesatuan yang utuh, juga pendekatan ini digunakan untuk analisis lebih dalam terhadap permasalahan yang ada, yakni perseteruan dan pengelolaan wisata religi makam dalem santri di desa Kotaliman-Banyumas (Moleong, 2007).

3. Hasil dan Pembahasan

Makam Dalem Santri Kotaliman Banyumas: Sebuah Tinjauan Historis

Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya selalu dihubungkan dengan para penyebar, tokoh agama, dan bahkan para ulama. Keteguhan dan didikasi yang dimiliki oleh para penyebar agama Islam di Banyumas dan sekitarnya begitu tampak dalam kehidupan masyarakat. Berdirinya masjid-masjid bersejarah dan banyaknya makam para penyebar agama Islam di wilayah Banyumas menjadi bukti nyata keberadaan mereka. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya adalah, Syekh Ahmad Muhammad.

Menurut informasi dari Mbah SN, sebagai juru kunci di Makam Dalem Santri, Raden Parto Kusuma Kerajaan Surakarta atau yang dikenal dengan nama syekh Ahmad Muhammad, merupakan salah satu tokoh pendakwah di sekitar Banyumas (Mbah SN, Komunikasi Personal, 2019). Syekh Ahmad Muhammad berhijrah ke daerah Pesantren karena ada dorongan kuat atas ikhtiar do'anya. Selain itu, Beliau juga selalu berkonsultasi dan minta bimbingan dari ayahnya. Sang ayah memberikan restu atas keinginan Syekh Ahmad Muhammad untuk mengembara dan ia dibekali seekor gajah sebagai alat transportasi untuk berkelana.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Eyang Kepadangan yang berasal dari Bagdad Irak. Eyang Kepadangan atau Syekh Mudhakir sebagai perintis peletakan dasar-dasar pendirian pesantren dan sosok yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Melalui Eyang kepadangan inilah, nama Raden Parto Kusumo diubah menjadi Syekh Ahmad Muhammad. Selanjutnya, Syekh Ahmad Muhammada belajar agama Islam dengan Eyang Kepadangan dan setelah dianggap mumpuni dan mendalam, kemudian Syekh Ahmad Muhammad berdakwah di sekitar Banyumas, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan Banyumas. Saat itu, masyarakat Banyumas masih kental dengan keyakinan mistik, dan dinamisme.

Setelah Syekh Ahmad Muhammad menetap di desa Pesantren, akhirnya masyarakat mengubah nama desa Pesantren menjadi desa Kotaliman, yang berarti sekelompok atau rombongan dari wilayah Surakarta dengan menaiki gajah. Kehadiran Syekh Ahmad Muhammad di Kotaliman diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga dakwah yang dilakukannya berjalan dengan lancar dan Islam berkembang dengan pesat di wilayah tersebut. Kisah kehidupan dan perjuangan Syekh Ahmad Muhammad tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar makam karena tokoh-tokoh kunci yang hidup semasanya atau menyaksikan perjuangannya telah tiada. Masyarakat hanya mengetahui tentang menetapnya Syekh Ahmad Muhammad hingga wafatnya melalui situs makam bersejarah ini. Lokasi makam Syekh Ahmad Muhammad, yang dikenal dengan makam Dalem Santri, terletak di kaki gunung slamet, tepatnya di desa Kotaliman, kecamatan Kedung Banteng, kabupaten

Banyumas. Jika di tempuh dari kota Purwokerto dengan berkendara motor membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

Para peziarah yang hadir banyak berasal dari berbagai kabupaten, khususnya dari Jawa Tengah. Untuk para peziarah dari Banyumas yang hendak berziarah ke makam para Wali Songo terlebih dahulu berkunjung ke makam Syekh Ahmad Muhammad.

Situasi Umum Makam Syekh Ahmad Muhammad

Kondisi makam Syekh Ahmad Muhammad berada dalam hutan dengan rimbunan pohon yang tua. Pepohonan besar yang kemungkinan sudah berumur ratusan tahun mengitari makam Dalem Santri. Selain rimbunan pohon, juga secara alami terbentang tanah dan lumut, serta tumpukan batu yang tertata rapi. Kondisi tersebut menambah suasana menjadi teduh dan gelap jika berada di sekitar area makam. Dengan luas tanah yang cukup lebar dan terhindar dari kotoran sampah, menambah keasrian suasana kubur dari al-marhum. Demikian juga, di luar area pemakaman terdapat lahan pertanian dan jauh dari rumah penduduk, ikut memberikan sumbangsih yang indah dan nyaman bagi keberadaan area makam ini. Makam Syekh Ahmad Muhammad berada tepat di bawah pohon besar yang dapat menambah kesakralan, angker dan keramat ketika berada di makam tersebut. Meski demikian, jarak antara pintu masuk dan kuburan relative tidak jauh, kurang lebih sekitar 50-75 meter, maka rasa takut atau khawatir para peziarah akan segera bertepi atau hilang.

Masyarakat mengenal makam ini dengan sebutan makam dalem santri yang artinya rumahnya santri. Masyarakat sekitar mengenal dan meyakini sosok Ahmad Muhammad adalah seorang wali yang memiliki tugas untuk mensyiarkan Islam di daerah Banyumas, khususnya di daerah kampung Pesantren (Kutaliman). Konon, nama makam dalem santri dipergunakan oleh masyarakat atau Sebagian orang yang mencintai ajaran Islam tempo dulu dan juga sebagai upaya untuk memiliki posisi sosial tinggi di tengah masyarakat mistik, animisme dan dinamisme. Berdasarkan informasi mbah SN bahwa keberadaan makam Dalem Santri tidak hanya makam Syekh Ahmad Muhammad, tetapi juga ada empat makam tua yang diyakini merupakan makam prabu Anom, Raga Patra, Engrang Jaya, dan Siti Zulaikha.

Dari informasi yang beredar dan didukung oleh mbah SN juru kunci Makam Dalem Santri, berziarah keempat makam tersebut (Prabu Anom, Raga Patra, Engrang Jaya, dan Siti Zulaikha) dipercaya oleh Sebagian masyarakat kejawen dapat membantu dalam hal perjodohan, pemilihan kepala desa, dan memberikan keberkahan dalam hal dagang, dan yang lainnya. Namun, demikian kekuatan yang ada merupakan kepercayaan kelompok kejawen dan berbeda dengan sebagian mereka yang hanya untuk sekedar berziarah.

Kegiatan ritual yang diadakan oleh masyarakat Kutaliman yang sering disebut khaul Makam Dalem Santri, diawali oleh tokoh pesantren Banyumas, yaitu K. SBR. Sejak dibuka dan diziarahi oleh K. SBR, makam Santri Dalem semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Menurut K. SBR, konon Syekh Ahmad Muhammad diyakini oleh masyarakat merupakan ulama kuturunan Timur Tengah yang memiliki relasi kekerabatan dengan keraton Surakarta. Namun, keyakinan tersebut belum dapat dibuktikan keasliannya dan bahkan pihak keraton Surakarta juga belum mengetahui tentang cerita tersebut (K.SBR, *Komunikasi Personal*, 2019).

Kelompok pengeloa juru kunci, Kelompok pengusung perubahan dan Pemerintah Desa Kutaliman

Sebagaimana kita ketahui, Konflik merupakan suatu fenomena yang akan selalu mewarnai interaksi sosial sehari-hari (Yaqinah, 2019). Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial adalah berinteraksi dengan sesama manusia, dan ketika berinteraksi dengan sesama manusia berpotensi mengakibatkan 2 (dua) hal, yakni konflik dan kerja sama (Sumartias & Rahmat, 2013). Situasi dan kondisi tertentu dapat menjadi pemicu konflik, mulai dari ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan batas-batas wewenang dan tanggungjawab, dan lain sebagainya (Sumartias & Rahmat, 2013).

Tabel 1. Objek dan Subjek Resistensi

NO	Bentuk Perselisihan	Afiliasi NU	Kelompok kontra	Pemdes	Keterangan
1	Pembangunan area makam	setuju	menolak	Setuju	Kenyaman vs mitos
2	Pembangunan mushola	setuju	menolak	Setuju	Kenyamanan vs mitos
3	Pembangunan area parker	setuju	setuju	Setuju	Kenyaman peziarah
4	Pembangunan pertokoan	setuju	Setuju	Setuju	Peningkatan income
5	Pengelolaan parkir	setuju	menolak	Setuju	income desa
6	Gagasan pembentukan Yayasan	setuju	menolak	Setuju	profesionalitas

Tabel 1 merupakan pemetaan temuan objek resistensi selama penelitian tentang pengelolaan makam Dalem Santri di desa Kutaliman kecamatan Kedung Banteng kabupaten Banyumas. Berkaitan dengan para pihak sebagai agen sosial dalam kepentingan pengelolannya ditemukan tiga kelompok yang memiliki pengaruh atau kekuasaan baik secara politik maupun sosial kemasyarakatan. Di samping kelompok sebagai agen sosial, juga objek atau 7 (tujuh) bentuk yang memunculkan konflik kepentingan dan dampak sosio ekonomi dalam relasi sosial di desa Kutaliman.

Beberapa agen tersebut memiliki sikap yang berbeda dan ada pula yang sama. Hal ini dibuktikan dengan sikap setuju dan menolak terkait dengan pengelolaan dan pembangunan baik di area dalam makam maupun di luar area makam Dalem Santri Kutaliman. Beberapa sikap yang saling bertentangan ini memunculkan konflik-konflik sosial dan bahkan memunculkan cibiran antar kelompok sosial. Bagi kelompok yang mendukung pengelolaan makam dengan pelibatan semua komponen masyarakat dan difasilitasi pemerintah desa dan upaya pembangunan sarana dan prasarana diharapkan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat. Bagi kelompok yang menolak pembangunan dan pengelolannya adalah mereka yang selama ini menguasai pengelolaan yaitu juru kunci dan keturunannya serta koleganya. Ada tujuh upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa, sebagaimana tergambar pada Tabel 1.

Secara umum dari Tabel.1 dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yang saling berhadapan, yaitu kelompok yang berafiliasi ormas NU (Ansor, Banser, Muslimat, dan IPNU) dan pemerintah desa Kutaliman sebagai lembaga yang memiliki otoritas kewilayahan dengan pihak kontra sebagai pengelola (existing) dengan kelompok yang menentang pengelolaan formal yaitu kelompok juru kunci dan komunitas sosial yang tak terorganisasi cenderung melakukan teror. Kelompok yang berafiliasi ormas NU ini mendukung dan terlibat dalam upaya melakukan pembenahan dan bahkan sejauhmana makam sebagai situs wisata religi layaknya makam para Wali Songo. Sebagaimana dalam pertemuan kelompok pro di ruang sekolah Maarif,

....kita yang hadir di forum ini perlu memetakan dan melakukan pendekatan personal kepada mereka yang mendukung juru kunci untuk tetap menguasai makam Dalem Santri, agar kita tidak selalu dihambat dengan opini yang dihembuskan tentang mitos "siapa yang melakukan perubahan dan pembangunan makam akan kena malapetaka....seperti peristiwa robohnya pohon besar yang menimpa bangunan mushola di depan makam dan menelan korban kematian. Situasi ini memperkuat para kontra dan berpengaruh pada ketakutan masyarakat (pengamatan partisipatoris, 2019).

Pada objek pembangunan area makam, situasinya masih alamiah makam berupa tumpukan batu yang tingginya kurang lebih satu meter persegi tepat di bawah pohon besar. Sekitar pusaran

makam masih beralaskan tanah yang penuh lumut hijau, tanpa alas lantai. Situasi tersebut mengundang banyak pihak untuk membangun dengan batako ataupun lantai semen. Banyak para tokoh dari luar daerah yang menginginkan pembangunan tersebut, namun kenyataannya ditentang oleh juru kunci, keluarga dan koleganya. Rencana ini ibarat gaung bersambut dan menjadi wacana umum di masyarakat Kutaliman sehingga menjadi pro dan kontra.

Kelompok yang mendukung adanya pemugaran ini adalah mereka yang berafiliasi ke ormas Nahdhotul Ulama (NU) baik Ansor, Muslimat, Banser, maupun pemerintahan desa. Argumentasi pihak pro adalah memberikan pelayanan kepada para peziarah yang mengalami peningkatan dan berasal dari berbagai daerah. Sedang pihak yang kontra, berargumentasi bahwa Syaikh Ahamad Muhammad tidak berkenan dan akan marah kepada siapa saja yang merubah pusaran makam dan area sekitar makam. Mitos ini dijadikan alat untuk menggagalkan upaya-upaya kelompok masyarakat dan pemerintah desa. Berbagai upaya pemerintah desa untuk mempertemukan dua kepentingan tersebut selalu gagal dan berakhir tegang. Ungkapan kelompok yang kontra, seperti:

....kami dan temen harus berjuang untuk mempertahankan makam Dalem Santri ini, agar tidak dibangun dan dirubah, karena syaikh Ahamad tidak berkenan dan bisa mendatangkan malapetaka bagi siapa saja yang memaksanya baik untuk membangun atau merubah area makam yang penuh rerimbun pohon besar ini, seperti yang pernah terjadi pohon besar tumbang ketika musim hujan dan angin besar terjadi menimpa bangunan mushola dan dua korban meninggal dunia....kejadian ini seharusnya masyarakat sadar dan jangan menerjangnya....(TF, KN, Komunikasi Personal, 2019).

Sikap kelompok juru kunci dan pendukungnya, menyetujui tentang pembangunan fasilitas parkir dan pertokoan, jalan menuju makam, tetapi pembangunan mushala yang dirintis oleh salah seorang tokoh mursyid Kyaiditentang dan bahkan mereka membuat upaya-upaya yang menyudutkan pembangunan mushola tersebut. Selain pembangunan mushala, pengelolaan parkir dan upaya pembentukan yayasan pengelolaan makam Dalem Santri juga ditentang dana bahkan hampir terjadi bentrok fisik antara pro dan kontra (AM, Komunikasi Personal, 2019).

Seiring bertambahnya para peziarah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, menurut penuturan YF (Komunikasi Personal, September, 2019), mulai terjadi perseteruan atau konflik tentang otoritas pengelolaan makam tersebut. Konflik yang muncul tidak terlepas dari kepentingan yang bersifat ekonomi dan kekuasaan. Makam Dalem Santri dipandang oleh berbagai pihak memiliki potensi untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi akibat dari bertambahnya para peziarah ke makam tersebut. Dalam konteks ekonomi politik, parameter yang digunakan merujuk pada konsep komodifikasi, spesialisasi, dan strukturisasi, sebagai berikut;

Komodifikasi

Partisipasi masyarakat sesungguhnya sangat besar menginginkan dikelola secara kelembagaan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada pengunjung, sarana mulai dibangun lahan parkir, warung, jalan akses masuk makam, dan para pedagang local mulai muncul. Fenomena ini dapat dijadikan bukti keterlibatan masyarakat sangat tinggi untuk keberlanjutan dan kemajuan wisata religi masa yang akan datang. Untuk memeperkuat upaya pelibatan masyarakat, seperti perhatian para tokoh agama yang membangun fasilitas mushala dan juga upaya salah satu tokoh Banyumas K.H. SB (2019) untuk menawarkan pembangunan fasilitas lantai area makam. Namun kecenderungannya juru kunci dan para koleganya menolaknya.

Perseteruan antara keluarga yang mengaku keluarga juru kunci, beberapa tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah desa telah menimbulkan beberapa persoalan. Pihak juru kunci merupakan petugas bukan dari masyarakat Kutaliman yang tidak menguasai sejarah geneologi makam syekh Ahmad muhammad dan hanya sebatas bersih-bersih serta menjadi petugas penarik infak (SLM, Komunikasi Personal, September, 2019). Penguasaan atas makam yang sangat lama dan bahkan secara turun temurun ini disebabkan oleh kepentingan income ekonomis untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, Tindakan penguasaan ini dianggap tidak pantas untuk menjadi

petugas atau pengelola makam Dalem Santri. Sebagian mereka (tokoh anak muda, tokoh agama, tokoh masyarakat) menginginkan perbaikan sarana di dalam makam dengan tujuan agar para peziarah nyaman ketika duduk melakukan tahlilan.

Selain pemerintah desa juga menginginkan pengelolaan makam Dalem Santri masuk dalam program anggaran pembangunan desa Kutaliman. Pembangunan arena parkir sudah dilakukan oleh pemerintah desa sehingga para pengunjung dari berbagai daerah meningkat tajam, hanya saja yang dipersoalkan adalah kontribusi finansial tidak terkelola dan tidak ada sharing baik kepada masyarakat maupun pemerintah desa, seperti pengelolaan parkir masih liar, dan pendapatan infak sebagai income secara personal bagi keluarga juru kunci. Keinginan berberbagai pihak yang mendukung dikelola secara transparan dan masuk dalam perda desa (Perdes) bahwa makam Dalem Santri dijadikan wahana wisata religi. Dalam konteks gagasan dan upaya pembangunan tata kelola ini merupakan realisasi transformasi nilai yang dipertukarkan dalam bentuk penggalangan dana (Mosco, 1996). Atau dalam pembangunan pedesaan merupakan penggalan salah satu sumber pendapatan desa dan peluang munculnya usaha baru bagi warga seperti pedagang kaki lima, warung makan dan lain lain. Pemerintah desa sangat berkepentingan untuk mengelola makam dan ada upaya memunculkan perdes yang dapat dijadikan dasar penataan pengelolaan Makam. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti (Rawis et al., 2015), penggalan potensi ekonomi dan berimplikasi pada persoalan soio-ekonomi, Pengembangan wisata gereja dan peningkatan ekonomi lokal (Gunawan et al., 2016), pengembangan dan faktor penghambatnya (M. A. Anwar, 2019) berbeda dengan kajian ini bahwa para agen kontra pengelolaan wisata religi berbasis komunitas (CBT) ini memunculkan penolakan bagi kelompok yang selama ini mengelola secara turun-temurun, mereka bagi kelompok pro dianggap sebagai pendatang baru dan tidak pernah berjuang selama ini. Suatu anggapan yang dikembangkan oleh kelompok kontra ini dibutuhkan dialog secara terus-menerus dalam hal konsesus yang mana masyarakat banyak diuntungkan untuk kepentingan pengelolaan. Ada hal yang menarik, adalah belum ada pembahasan share income baik pengelola maupun pemerintah desa, sehingga yang muncul kecurigaan-kecurigaan terutama bagi kelompok kontra.

Dalam persoalan kualifikasi juru kunci dipertanyakan oleh sebagian masyarakat baik posisi dan kapasitas juru kunci dianggap tidak layak. Tuntutan kualifikasi juru kunci tidak sebatas berfungsi sebagai tenaga kebersihan, namun mampu melayani peziarah atau pengunjung baik sebagai sumber informasi tentang sejarah makam Dalem Santri maupun sebagai imam tahlil. Praktik juru kunci tersebut sebagai cibiran atau sebuah ejekan yang menempatkan pada posisi sosial yang tidak layak atau yang disebut dengan parody (Mattelart & Mattelart, 1992). Simbolisasi ejekan ini merupakan penolakan masyarakat yang menginginkan perubahan pengelolaan lebih profesional. Dalam konteks tersebut, proses perubahan sosial telah terjadi secara bertahap baik bersifat dialogis- structural maupun para agen sosial. Situasi realitas sosial yang ada ini dibutuhkan kegiatan edukasi masyarakat baik diperuntukkan pada kelompok pro dan kontra dan diperlukan keasadaran bersama untuk perubahan pengelolaan wisata religi berstandar CBT.

Spasialisasi

Konsep spasialisasi ini merujuk pada upaya menumbuhkan kekuatan kapital yang digunakan dan untuk memperbaiki transportasi dan komunikasi, dan dari keduanya memunculkan hambatan atau pembatasan ekspansi kapital (Mosco, 1996). Beberapa informasi yang didapat dari tabel.1 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh kelompok pro dan pemerintah desa untuk meningkatkan kapital dan pembangunan transportasi. Begitu pula banyaknya yang berkunjung atau berwisata dapat dijadikan bukti bahwa desiminasi wisata makam Dalem Santri tengah terjadi. Dalam hal ini, data yang dapat digunakan bagi kelompok pro adalah semakin banyak pengunjung, maka akan semakin besar pendapatnya, baik melalui pengelolaan parkir menurut informasi "...parkir angkutan bus Rp. 100.000, mobil pribadi Rp.50.000.000, dan sepeda motor Rp. 10.000 pendapatan ini dikuasi oleh mereka secara bebas....". Sisi lain adalah setiap pengunjung mengisi kotak infak yang disediakan oleh juru kunci...."

Pendapatan lahan parkir dan kotak infak merupakan sumber yang dapat digunakan untuk kesejahteraan lingkungan dan sekaligus income pemerintah desa. Dalam konteks ini, peraturan desa (perdes) sesungguhnya dibutuhkan untuk legalitas dan kontrol pelaku sosio-ekonomi desa Kutaliman. Realitasnya pemerintah desa belum dapat melakukan inisiasi dan melibatkan masyarakat desa sebagai bagian pelaku dan pemilik wilayah wisata religi yang idealitas dapat mengatur dan mengelolanya.

Dukungan masyarakat yang berafiliasi ke ormas Nahdhatul Ulama, Ansor, Muslimat, dan Pemuda Pancasila, aparat pemerintah desa Kutaliman, dan bahkan jama'ah Tarekat membangun Mushola sebagai fasilitas. Modal sosial dalam melakukan perubahan pengelolaan berbasis masyarakat luas sebetulnya sudah dilakukan tetapi yang menjadi persoalan adalah kelompok yang mendukung juru kunci. Dalam konteks, modal sosial banyak yang berkepentingan terutama institusi-institusi keagamaan yang mengopinikan dan menjadi sebuah market (pengunjung), di antaranya adalah para jama'ah tarekat Qadiriyah, Qadiriyah wan Naqshabandiyah, Szalياهو, Syatariah, dan pesantren-pesantren di sekitar Banyumas. Para pengikut tarekat ini melakukan kegiatan ziarah di makam Dalem Santri. Dalam hal ini, relasi sosio-ekonomi terbangun terbangun melalui interaksi agen sosial yang terus menerus berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penelitian ini berbeda dengan kepariwisataan secara umum, telah dilakukan, menunjukkan ada beberapa aspek negatif dalam pengembangan produk wisata, termasuk potensi keterkaitan antara jumlah wisatawan yang tinggi dan hilangnya identitas budaya; dan hipotetis degradasi sumber daya alam (Gronau & Kaufmann, 2009). Dalam hal ini, warga memiliki lima alternatif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat – perlawanan, mundur, pemeliharaan batas, revitalisasi dan adopsi (Doğan, 1989). Yang diperhatikan adalah pariwisata dapat mengubah (atau bahkan menghancurkan) budaya lokal jika diperlakukan hanya sebagai daya tarik wisata dan hanya bertujuan untuk pengembangan daerah yang cepat (Dyer Jr, 2003). Penelitian ini menekankan pada pengelolaan berbasis komunitas, namun kecenderungan yang muncul adalah penolakan dan perlawanan dari sisi peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, dominasi minoritas sangat kuat untuk menguasai dan mampu mengendalikan situs sebagai wahana untuk berkuasa akses sumber daya, dibuktikan oleh penguasaan yang eksisting tidak tergoyah oleh mayoritas agen-agen sosial yang pro pada pengelolaan berbasis komunitas.

Strukturisasi

Bertitik tolak dari fenomena dan persoalan yang ada di masyarakat sekitar makam Dalem Santri, maka tim peneliti - pengabdian masyarakat dari IAIN Purwokerto melakukan upaya edukasi yang berbasiskan pada *Clinic Coaching*. Edukasi masyarakat merupakan strategi untuk perubahan cara berpikir masyarakat atas persoalan tertentu. Edukasi dalam konteks pengabdian lebih menitikberatkan aspek dorongan diri dan kesadaran spiritualias atas potensi yang dimiliki individu dan masyarakat. Salah satu program kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa tokoh yang berpengaruh untuk berdiskusi tentang makam Dalem Santri di kalangan NU, ANSOR, dan pemuda Pancasila atas potensi strategis Makam Dalem Santri sebagai wahana wisata religi dan pengembangan potensi ekonomi pedesaan.

Kegiatan edukasi ini diikuti oleh beberapa tokoh ormas dan pejabat desa, antara lain Banser, Ansor, Tanfidziyah NU, Syuriah NU, Linmas, Pemuda Pancasila, RT, Kades, dan mantan Kades (2019). Kegiatan ini membahas pentingnya penguatan dan pengembangan masyarakat desa Kutaliman mengembangkan salah satu potensinya yaitu wisata religi dengan mendayagunakan dan medesain makam Dalem Santri Syekh Ahmad Muhammad ini dalam istilah Giddens dalam (Mosco, 1996) merupakan dualitas yang membangun peraturan (*rules*) yang disepakatinya dan memungkinkan sebagai penggalan *resources*. Dari kegiatan ini diharapkan menyatukan persepsi penting melalui pendekatan kultural dan sosialisasi potensi desa secara masif dan *soft* ke berbagai kalangan dan tokoh sehingga dengan harapan tidak terjadi konflik atau kontra atas program penggalan potensi tersebut.

Langkah konkrit dalam edukasi tersebut berawal dari pemetaan aset-aset desa. Kotaliman merupakan desa yang memiliki potensi wisata keagamaan dan aset pertanian dan budaya. Salah satu aset sosial yang dapat dikembangkan adalah mayoritas tokoh dari berbagai kalangan memiliki satu persepsi tentang pengembangan makam sebagai salah satu potensi wisata strategis. Mereka menyadari aset makam Dalem Santri akan berpengaruh secara multiplikatif dari potensi-potensi lain yang di milikinya merupakan tindakan yang dibutuhkan mereka dan sekaligus posisi para tokoh yang memiliki persepsi yang sama merupakan bentuk agen pembaharuan. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Syuriah NU dan pejabat desa bahwa dengan banyaknya para peziarah akan memunculkan sumber-sumber ekonomi baru seperti di makam-makam para wali (Sunan Muria, Kudus, Demak dan bahkan Makam Gus Dur). Ini adalah multiefek yang akan berpengaruh pada peningkatan pedesaan, khususnya Kotaliman.

Selanjutnya selama pengamatan partisipatif dengan kelompok yang berseteru tersebut. Persoalan mendasar yang dibahas berkenaan dengan penyamaan persepsi tentang pentingnya pengembangan dan pemeliharaan makam Dalem menjadi sumber ekonomi baru masyarakat, seperti pedagang atau warung-warung baru. Penyamaan persepsi ini penting ada perubahan mindset dari kelompok kepentingan tersebut. Dalam proses tersebut, mereka saling berargumentasi untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing. Tim fasilitator dalam konteks semacam ini perlu memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menjembatani konflik kepentingan tersebut. Cara yang terbaik adalah mencari *win win solution* dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan makam sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah ada persamaan persepsi, akhirnya mereka sepakat membentuk *team work* yang diketuai oleh Tf (Pengurus Ansor Kotaliman). Tim terdiri atas: Tf, Yns, Abr, dan Hmt. Tim tersebut bertugas melakukan pemetaan dan komunikasi untuk menyatukan persepsi akan program potensi wisata religi Kotaliman.

Tim work sejak dibentuk telah melakukan beberapa pemetaan sebanyak 10 orang pemuda untuk berdiskusi yang diadakan di rumah Af dan Yp (2019). Dalam pembicaraan tersebut didapatkan informasi bahwa, "ada beberapa tokoh yang sengaja mencoba untuk menggagalkan di antaranya juru kunci yang secara pribadi tidak setuju makam Dalem Santri dikelola secara kelembagaan". Selain hal tersebut, ada beberapa individu yang sengaja menguasai wilayah parkir. Praktik pemungutan parkir dengan memaksa atau tidak sesuai standar akan melahirkan premanisasi yang eksploitatif. Penolakan ini menurut Giddens merupakan *constraining rules and enabling resources*.

Komunikasi antar lembaga sosial kemasyarakatan dalam persoalan ini dibutuhkan dan dilakukan oleh *team work* yang dipimpin oleh Af dan kawan-kawannya. Ada beberapa langkah yang sangat menarik upaya untuk membangun *trust*, adalah kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk mendorong "agar peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan wisata pada umumnya dan khususnya pengelolaan makam Dalem Santri di Kotaliman" (Pengamatan partisipatif, 2019). Hal ini direspon positif oleh kades dan para pejabat desa. Hanya saja persoalannya merasa kesulitan untuk membuat naskah akademis peraturan desa tersebut, namun langkah yang diperlukan oleh desa dapat melakukan studi banding desa lain yang pernah melakukan pembuatan peraturan desa tentang desa wisata.

Praktik premanisme dan tindakan merusak yang pernah terjadi dijadikan pengalaman para tokoh desa Kotaliman. Pendekatan kultural merupakan pilihan yang dianggap tepat dengan melakukan komunikasi dan penyatuan persepsi arti pentingnya kebersamaan dan kelembagaan sebagai upaya pencapaian tujuan terkelolanya makam Dalem Santri dengan cara menghindari konflik warga desa. Selain itu, diperlukan pelibatan semua pihak dan memberikan porsi yang seimbang kepada pendukung juru kunci yang selama ini merawat dan mengelola aset makam Dalem Santri. Dengan demikian proses komunikasi melalui media struktural yang ditempuh baik melalui ormas keagamaan, para agen, dan pemerintah desa merupakan proses yang merespon baik secara fungsional, institusional dan struktural (Garnham, 1990). Situasi ini ada peluang untuk melembagakan pengelolaan dengan membentuk Yayasan yang anggotanya melibatkan semua komponen yang berkepentingan. Berdasarkan meluas dan menguatnya dukungan dari berbagai pihak pengelolaan berbasis komunitas akan memberikan solusi dan memperkecil konflik.

4. Simpulan

Pengelolaan wisata religi berbasis komunitas (CBT) yang menitik beratkan pada partisipasi dan pelibatan masyarakat local dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam makam Dalem Santri Kutaliman Banyumas memunculkan resistensi oleh sebagian kelompok minoritas berdasarkan paradigma ekonomi politik dapat diukur melalui beberapa sudut pandang, dengan melahirkan beberapa implikasi antara lain 1)komodifikasi, proses ini diproduksikan melalui pembangunan sarana prasarana yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal sebagai upaya pelayanan para wisatawan religi yang bertujuan pada pemberian kenyamanan, namun penolakan yang muncul dalam bentuk kepentingan ekonomi yang cenderung penguasaan personal dan kelompok kecil. 2) Spasialisasi, proses ini terbentuk melalui relasi-relasi kelompok keagamaan secara kultural keterlibatannya adalah gerakan tarikat sebagai pengembangan market wisata religi. Dukungan kuantitas masing-masing pengikut tarikat memberikan andil signifikan dalam kunjungan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat local, sehingga memunculkan kepentingan agen lokal semakin tajam. 3) Strukturisasi, proses dialektis antara masyarakat dan pemerintah desa memicu konflik institusi menjadi bukti masih ada ruang kosong yang belum terwujud dalam bentuk Yayasan maupun peraturan desa yang memberikan legitimasi dalam pengelolaan makam Dalem Santri.

Objek Wisata Religi dapat memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar, baik dari aspek ekonomi, social-budaya, dan lain sebagainya, apabila dikelola dengan baik. Makam Dalem Santri sebagai objek wisata belum dapat berperan optimal sebagaimana mestinya, karena disebabkan manajemen yang belum mapan dan diperburuk dengan adanya konflik kepentingan.

Penelitian pengelolaan wisata religi ini berbasis Community based on Tourism masih banyak keterbatasan yang dibuktikan dengan resistensi yang ada. Oleh karenanya, dibutuhkan eksplorasi dengan model pengelolaan yang lain seperti pengelolaan berbasis enterpreunuer.

Referensi

- Annisa, F. (2018). Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populism. *MAARIF Journal*, 13(1), 38–54.
- Anwar, M. A. (2019). Kajian Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 183–194.
- Anwar, M. F., Hamid, D., & Topowijono, T. (2017). Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, madalam Kehidupann Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Pada Kelurahan Gapurosukolilo Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 44(1), 186–193.
- Anwar, R. K., Komariah, N., & Rahman, M. T. (2017). Pengembangan Konsep Literasi Informasi Santri: Kajian di Pesantren Arafah Cililin Bandung Barat. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 131–142.
- Ariyanto. (2005). *Ekonomi Pariwisata*. PT Gramedia.
- Bourdieu, P. (1998). *Practical reason: On the theory of action*. Stanford University Press.
- Doğan, H. Z. (1989). Forms of adjustment: Sociocultural impacts of tourism. *Annals of Tourism Research*, 16(2), 216–236.
- Dyer Jr, W. G. (2003). The family: The missing variable in organizational research. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 27(4), 401–416.
- Fachri, S. (2018). Objek Wisata Religi: Potensi dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Pada Makam Syekh Mansyur Cikadueun, Pandeglang). *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(1), 25–44.
- Garnham, N. (1990). *Capitalism and communication: Global culture and the economics of information*. Sage Publications (CA).
- Graham, P. W. (2007). Political economy of communication: A critique. *International Business*, 3(3), 266–245.
- Gronau, W., & Kaufmann, R. (2009). Tourism as a stimulus for sustainable development in rural areas: A Cypriot perspective. *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*, 4(1), 83–95.
- Gunawan, A. S., Hamid, D., & Wi Endang NP, M. G. (2016). Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(1), 1–8.
- Hartiningsih, H. (2019). Potensi Wisata Religi Dan Problematika Pengembangannya. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 231–247.
- Kayat, K. (2010). The nature of cultural contribution of a community-based homestay programme. *Tourismos: An*

- International Multidisciplinary Journal of Tourism*, 5(2), 145–159.
- Kibicho, W. (2008). Community-based tourism: A factor-cluster segmentation approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(2), 211–231.
- Mattelart, A., & Mattelart, M. (1992). *Rethinking media theory: Signposts and new directions*. University of Minnesota Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mosco, V. (1996). *The political economy of communication: Rethinking and renewal* (Vol. 13). Sage.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- Rawis, P., Posumah, J., & Pombengi, J. D. (2015). Pengembangan Objek Wisata Religius dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Suatu studi pada Objek Wisata Bukit Kasih Toar Lumimu'ut kanonang Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Salah, W. (1989). *Manajemen Kepariwisata*. Pradnya Paramita.
- Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1), 13–20.
- Yaqinah, S. N. (2019). Resolusi Konflik Sosial melalui Pendekatan Komunikasi di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 9(2), 210–234.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

This page is intentionally left blank